

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Amzah, Jakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 243.
- Advensi Simangunsong dan Eli Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran: Strategi dan Implementasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamala*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2008.
- H.R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- J Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1993.
- J Satrio, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 57-58
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang,

2001.

- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Nata Karya, Ponorogo, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Mertokusumo. Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Mahmud Yunus, Jakarta, 2018.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muskibah, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Neni Sri Imaniyati, dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016.
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. 6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law Di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1986.
- Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Sari Murti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2006.

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Subari, Sri Mulyati Tri, dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, 2017.
- Tim Inisiatif Bank Indonesia. “*Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*” Jakarta, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Ctk. Ketujuh, Bandung, 1979

## **Jurnal**

- Afriani, Lilis, Hafizah, dan Muhammad Purwanto. “Hukum Pembayaran QRIS (*Quick Response Code*) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Perspektif Agama Dan Identitas*, Vol. 9 No. 6, 2024.
- Andina Dwijayant, dkk., “Manfaat *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Pada Nasabah Di Bank Jabar Banten (BJB),” *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Andria Luhur Prakoso, Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prosiding Seminar Nasional “*Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidu Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan World Wide Fund (WWF)*”, Prosiding Seminar Nasioanal, Surakarta, 2016.
- Aryo Pinandito, dan Raihan Fikri Brilliansyach, “Efisiensi Penggunaan QRIS dengan *Merchant Presented Mode* dalam Transaksi Pembayaran Non-Tunai,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 11, No. 4, 2024.
- Claudia Yuniar Hutabarat dkk., “Sosialisasi QRIS pada Generasi Milenial dan Gen-Z dalam Upaya Melek Digitalisasi Pembayaran Non-Tunai” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2 ,2024.
- Darmawan D., “Perkembangan Teknologi *QR Code* dalam Sistem Pembayaran di Indonesia,” *Jurnal Tekonologi Informasi Dan Bisnis* Vol. 8, No. 3, 2021.
- Desy Natalia Kristanty, “Tren dan Tantangan Keamanan Bertransaksi dengan QRIS dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital” *Syntax Admiration*,

Vol. 5, No. 10, 2024, hal. 3923–3933.

- Dewi, Vera Intanie. “Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia.” *Bina Ekonomi* 10, No. 2, 2006.
- Dosni Ana Ragita Pakpahan, “Penerapan *Prinsip Good Corporate Government* dalam Hukum Perusahaan: Mengoptimalkan Akuntabilitas dan Transparansi di Perusahaan Indonesia”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1, No. 6, 2024.
- Eni Puji Astuti dkk., “Penerapan Konsep dan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Penerapan Konsep dan Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. KIW (Persero)”, *Jurnal CAPITAL*, Vol. 4, No. 1, 2022
- Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani. “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS sebagai Kanal Pembayaran pada Praktik UMKM dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital.” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 03, Desember, 2021.
- Gentur Cahyo Setiono dan Irham Rahman, “Tanggung Jawab Bank sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan,” *Transparansi Hukum*, Vol. 5, No. 1 2022.
- Julia Black dkk., “*Making a Success of Principle-Based Regulations*,” *Law and Financial Markets Riview*, Vol. 1, No. 3, 2007.
- Julia Black dkk., “*Principles-Based Regulation: Risks, Challenges and Opportunities*”, *Law and Financial Markets Review*, Vol. 1, No. 3, 2007.
- Krismiaji, “Standar Akutansi: Kajian Kritis *Principle-Based Versus Rule-Based*”, *WAHANA*, Vol.13, No. 1, 2010.
- Krisnadi Nasution, “Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang Bus Umum,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, 2014.
- Ni Kadek Wulan Juliandini, Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Efektivitas Penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Kumbasari Denpasar,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Nurmasyithah Ziauddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Risma Arum Azzahroo dan Sri Dwi Estiningrum, “Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* Sebagai Teknologi Pembayaran,” *Jurnal Manajemen Motivasi*, Vol. 17, No. 1, 2021.
- Sihaloho, Josef Evan, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti. “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesia Standard* Universitas Sumatera Utara.” *Jurnal Manajemen Bisnis*, no. Vol. 17, No. 2, April, 2020.

- Sri Anugrah Natalina, Arif Zunaidi, dan Risa Rahmah, “*Quick Response Code Indonesia Standard* Sebagai Strategi Survive UMKM di Masa Pandemi di Kota Kediri,” *ISTHITMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Sri Oktapiani dan Yuman Firmansyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemotongan Timbangan Buah Sawit di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi”, *Jurnal Kajian Manajemen dan Pariwisata Syariah*, Vol. 8, No. 1, 2024
- Vina Rahmadhani and Yuniarti, “Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor Perbankan dalam Transaksi Menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS),” *Jurist-Diction*, Vol. 6, No. 4, 2023.

## **Peraturan**

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 /POJK.07/2020 tentang Penyelenggara Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/7/PADG/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.

Keputusan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Nomor ASPI/K-II/6/XII/2022 tentang Penyusunan Materi Edukasi Untuk *Merchant* dan Pengguna QRIS.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.

Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 21/1/Kep.Dg/2019 tentang Penetapan Skema dan Biaya Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang Difasilitasi Dengan Quick Response Code Pembayaran Berdasarkan Standar Nasional Quick Response Code Pembayaran Merchant Presented Mode

## Internet

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. “Apa Itu QRIS?,” 2021, [https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qr/#:~:text=Apa itu QRIS%3F](https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qr/#:~:text=Apa%20itu%20QRIS%3F), diakses pada tanggal 16 Februari 2025 pukul 18.37 WIB.

Ayu Isti Prabandari, “Arti Merchant: Pengertian, Jenis, dan Peran Penting dalam Dunia Bisnis,” LIPUTAN 6, 2025, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5922792/arti-merchant-pengertian-jenis-dan-peran-penting-dalam-dunia-bisnis?page=4>, diakses pada tanggal 24 Juli 2025 pukul 16.05 WIB.

Bank Indonesia. “Elektronifikasi.”, 2025. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>.

———. “Merchant Diskon Rate (MDR) Uang Elektronik Chip-Based,” [https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01029/en-us#:~:text=MDR merupakan kewajiban yang dibayarkan,kenaikan harga produk atau layanan.&text=2\) 0%25 untuk transaksi G2P,%2C dan donasi \(nirlaba\)](https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01029/en-us#:~:text=MDR%20merupakan%20kewajiban%20yang%20dibayarkan,kenaikan%20harga%20produk%20atau%20layanan.&text=2%200%25%20untuk%20transaksi%20G2P,%2C%20dan%20donasi%20(nirlaba)), diakses pada tanggal 04 Juni 2025 pukul 18.09 WIB.

BANK INDONESIA. “Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah,” <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses pada tanggal 7 Juni 2025 pukul 16.52 WIB.

Departmen Komunikasi, “BI Reformasi Pengaturan Sistem Pembayaran Indonesia,” BANK INDONESIA, 2021,

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_230621.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_230621.aspx), diakses pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 13.51 WIB.

Digibank. “Sejarah QRIS Di Indonesia Dan Manfaatnya Hingga Kini,” 2024. <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/sejarah-qr-is-di-indonesia-dan-manfaatnya-hingga-kini>, diakses pada tanggal 12 Februari 2025, pukul 01.10 WIB.

Indriyanti, Annisa Nur. “Waspada! Ini Sanksi Yang Diterima Jika Pedagang Menambahkan Biaya QRIS,” 2024. <https://majoo.id/solusi/detail/ini-sanksi-yang-diterima-jika-pedagang-menambahkan-biaya-qr-is>, diakses pada tanggal 16 Februari 2025 pukul 18.49 WIB.

Irawati, “BI Pelototi Merchant Nakal Yang Bebankan Biaya QRIS 0,3 Persen Ke Konsumen,” infobanknews, 2024, <https://infobanknews.com/bi-pelototi-merchant-nakal-yang-bebankan-biaya-qr-is-03-persen-ke-konsumen/>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2025 pukul 17.33 WIB.

Kledo, “Surcharge Adalah: Contoh Penerpannya dalam Bisnis”, <https://kledo.com/blog/surcharge-adalah/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 13.16 WIB.

Kusnandar, Viva Budi. “Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp1,6 Kuadriliun Pada Januari-Agustus 2024,” 2024. <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/673216a38c1bc/nilai-transaksi-uang-elektronik-capai-rp16-kuadriliun-pada-januari-agustus-2024#:~:text=Uang-,Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp1,Kuadriliun pada Januari-Agustus 2024&text=Bank Indones>, diakses pada tanggal 11 Februari 2025, pukul 22.30 WIB.

Netzme. “Jualan Makin Cuan Dengan MDR 0% Untuk Transaksi QRIS UMKM!”, 2025. <https://www.netzme.id/jualan-makin-cuan-dengan-mdr-0-untuk-transaksi-qr-is-umkm/>, diakses pada tanggal Februari 2025 pukul 21.25 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*, 2024, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx), diakses pada tanggal 20 Oktober 2025 pukul 13.45 WIB.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Iswahyudi selaku *Frontliner* Bank Syariah Indonesia, pada tanggal 22 Oktober, pukul 16.08 WIB.

Wawancara dengan pemilik warung Djuminten Lombok Ijo, pada tanggal 22 Oktober 2025 pukul 11.47 WIB.